

STRATEGI KONTRA OPINI PEMBERITAAN PALSU (HOAX)

OLEH DINAS PENERANGAN ANGKATAN DARAT

COUNTER FAKE NEWS OPINION STRATEGY

BY ARMY INFORMATION SERVICE

Benny Lesmana¹, Yudi Rusfiana², Ridwan Gunawan³

Prodi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

(bennylesmana096@gmail.com, rusfianayoudhy@gmail.com,
gunawanridwan1992@gmail.com)

Abstrak -- Permasalahan pemberitaan palsu atau *Hoax* yang sudah merambah di lingkungan TNI AD pada era globalisasi ini dimana perkembangan arus teknologi informasi yang bergerak sangat cepat dan dinamis telah mengubah tatanan berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini merupakan bagian dari perang informasi yang mengancam dan membahayakan kedaulatan negara. Dinas Penerangan Angkatan Darat sebagai salah satu institusi jajaran TNI AD menjalankan tugas menyampaikan informasi secara benar dan profesional tentang tugas TNI AD sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat kepada prajurit dan masyarakat, serta memberikan tanggapan yang simpatik manakala ada suatu informasi yang dianggap dapat merugikan citra positif TNI AD melalui media yang ada di Dispenad seperti Media Cetak, Media Elektronik, Media Online dan Penerangan Satuan serta Penulisan Strategis, sesuai dengan Buku Petunjuk Dispenad Nomor Perkasad 6/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Organisasi dan Tugas Dinas Penerangan Angkatan Darat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, analisis data menggunakan analisis domain. Lokasi penelitian di Dinas Penerangan Angkatan Darat. Penelitian menunjukkan bahwa: Untuk mewujudkan strategi kontra opini pemberitaan palsu atau *hoax* oleh Dispenad, perlu adanya perubahan organisasi atau validasi Dinas Penerangan Angkatan Darat disesuaikan dengan prediksi perkembangan ancaman menggunakan teknologi informasi di masa depan, serta dikembangkan kerjasama secara sinergi dengan institusi lain guna menghadapi perang informasi. Dengan demikian implikasi dari opini dan pemberitaan palsu bagi TNI AD yang mengganggu tugas pokoknya dapat diminimalisir dengan optimal. Sehingga strategi kontra opini *hoax* yang berpengaruh baik terhadap kedaulatan negara dapat dituntaskan sebagaimana yang diinginkan oleh TNI AD maupun masyarakat.

Kata kunci: Berita palsu, *Hoax*, Kontra opini

Abstract -- *The problem the increasing prevalence of fake news or hoax that has penetrated the Indonesian Army, especially in today's globalised era where information and communication technology continues to develop at a fast and dynamic pace and has a strong influence on many aspects of our lives. Fake news*

¹ Mahasiswa Program Studi Strategi Pertahanan Darat Cohort 5 Universitas Pertahanan

² Dosen tetap IPDN

³ Sekretaris Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

constitutes part of information warfare that threatens and endangers a nation's sovereignty. In this regard, the role of the Army Information Department is to disseminate accurate and professional information to both our soldiers and the society on the key tasks of the Indonesian Army as a critical national institution. In addition, the department also provides a sympathetic response to any information that tarnishes the positive image of the Indonesian Army through all means available to the Army Information Department such as printed media, electronic media, and online media. This is based on the Information Unit and Strategic Framework as a result of the Army Information Department Directive No. 6/II/2015 dated 4 Feb 2015 regarding the roles and organisation of the Army Information Department. This research is carried out using the qualitative method. The data is gathered through ground observation, interviews and literature review during the field study phase, while data analysis is conducted at the same time using the domain analysis method. The location of the research the Army Information Department. Results of the research has shown that in order to implement a counter-opinion strategy against fake news and hoax in the Indonesian Army, structural changes and validation of the Army Information Department are required based on future predicted threat developments in the domain of Information Technology, as well as the development of sinergistic cooperation with other institutions in meeting the challenges of information warfare. Through this, the impact of fake news and opinions on the key tasks of the Indonesian Army would be effectively neutralised and the counter-opinion strategy would be able to positively influence Indonesia's sovereignty in accordance with the hopes and expectations of the Army and the broader society.

Keywords: Fake news, hoax, counter-opinion

Pendahuluan

Seiring dengan terus berkembangnya lingkungan strategis, paradigma perang yang senantiasa mewarnai dinamika kehidupan manusia dan hubungan antar bangsa, telah semakin bergeser. Apa yang dikatakan oleh Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, bahwa Spektrum perang telah menjadi jauh lebih luas dan secara lebih spesifik, generasi perang pun terus berubah menuju ke generasi yang semakin kompleks dimensinya⁴. Perang tidak lagi harus dimaknai sebagai sebuah konflik antar bangsa yang diwarnai dengan penggunaan kekuatan bersenjata, walaupun penyiapan

kekuatan bersenjata tetap harus dilakukan sebagai bagian penting dari kompleksitas dimensi perang secara keseluruhan. Perubahan strategi perang dari *face to face* menjadi *Who is behind and when it is beginning*. Kompleksitas permasalahan yang berlangsung saat ini, komunikasi memiliki kedudukan yang semakin dominan dan determinan dalam menyelesaikan persoalan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bergerak sangat cepat dan dinamis memang sudah dirasakan sangat penting perannya oleh sebagian besar masyarakat di bumi ini, mengubah tatanan

⁴ Jend TNI Gatot Nurmantyo. *Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri sebagai Modal Membangun menuju Indoensia Emas*. Puspen TNI. Jakarta. 2016. Hal 21.

berbagai aspek kehidupan. Komputer, telepon genggam, televisi global telah mengalirkan arus informasi yang deras menembus batas-batas negara tanpa bisa dihentikan. Tujuan utama dari perkembangan teknologi informasi adalah membawa perubahan kehidupan masa depan manusia di dunia ini untuk lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Kita mengenal internet sebagai penunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat dengan tanpa batas yang berdampak positif mencari keuntungan dan negatif membahayakan kehidupan peradaban masa kini dan masa depan. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa manusia ke dunia informatif yang revolusioner, dinamis dalam komunikasi secara praktis. Teknologi diharapkan membantu seluruh manusia untuk hidup lebih sejahtera, aman dan nyaman. Realitanya, banyak dimanfaatkan dalam bentuk tindak kejahatan. Timbulnya kecemasan akan kekhawatiran perkembangan tindak kejahatan teknologi informasi yang mengancam kehidupan setiap manusia di negara-negara dunia seperti *Cybercrime*, *Transnational Crime*, Pornografi,

Digital Terrorism (Terorime Digital), *Hacker and Cracker* yang semuanya merupakan bentuk **Perang Informasi** dan bahkan mengarah ke *Cyberwarfare*.

Perang informasi menurut Col Alan D. Ceump, Perwira dari USAF, mengatakan bahwa, "*Tindakan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk manipulasi, tiadakan, kacaukan atau hancurkan informasi dan sistem informasi lawan, baik pada masa damai, masa krisis atau masa perang yang menyentuh pada bidang sosial, ekonomi, industri atau sistem informasi elektronik militer*". Bangsa Indonesia sudah berada di dalam perang informasi. Terbukti setiap detik, menit, jam dan hari warga negara Indonesia menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Dari data laporan Tetra Pak Index tercatat pada tahun 2017 ada lebih 106 juta orang Indonesia menggunakan media sosial tiap bulannya dan 85% diantaranya mengakses sosial media melalui perangkat seluler⁵. Tahun 2016 tercatat 64,68 juta pengguna internet dan tahun 2017 meningkat menjadi 132 juta pengguna internet dengan 40% menggunakan aktif media sosial. Menurut *Wheresocial* dan *Hotsuite* tahun 2017 disebutkan Indonesia

⁵ Detik.com, dalam <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-pengguna-medsos>, diakses pada 10 Februari 2018.

mengungguli Jepang dalam hal internet dan media sosial dengan 46% mengakses *Youtube*, 115 juta pengguna *Facebook* dan 97% mengakses media sosial melalui telepon seluler. Pada 2 tahun terakhir ini, adanya konflik sosial baik perorangan maupun kelompok terjadi diakibatkan berawal dari gesekan di media sosial dan media massa. Konflik dilandasi suhu politik bangsa, sosial, ekonomi dan intoleransi agama. Semuanya itu muncul karena beda kepentingan dan penyebaran **berita palsu** atau **Hoax** secara viral dan masif. Sehingga ini menjadi pembodohan disengaja terhadap masyarakat luas. Selain itu muncul propaganda-propaganda yang mengarah terhadap pengikisan sikap ideologi masyarakat untuk anti terhadap Pancasila, UUD 1945, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan konflik komunal.

Maraknya penyebaran berita *Hoax* di jagat maya ternyata sudah tersusun secara rapi. Banyak berita dan kabar miring yang bertebaran di media sosial dengan mudah dipercaya dan tanpa diperiksa akan sumber informasinya oleh masyarakat pengguna media. Jika sumbernya tak jelas, perlu waspada dalam menyikapi bahkan

menyebarkannya berita. Sebab, bisa jadi ini sudah menjadi ulah kelompok penyebar berita bohong (*hoax*) dan SARA. Terbongkarnya sindikat Saracen⁶ yang diduga aktif menyebarkan berita bohong bernuansa SARA di media sosial berdasarkan "pesanan", memang merupakan hal yang terorganisir, bukan semata aksi individu dan uang semata, ada indikasi-indikasi lain untuk kepentingan kelompok yang disengaja untuk menjatuhkan pemerintah agar menjadi gaduh. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, dengan modus sindikat yang beraksi sejak November 2015 tersebut mengirimkan proposal kepada sejumlah pihak, kemudian menawarkan jasa penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial.

TNI AD memandang kondisi seperti ini adalah suatu ancaman yang harus diantisipasi dalam rangka menghadapi perang informasi. Senada dengan penyampaian Amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono yang bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta (17/8/2017), "Ancaman perang informasi tidak

⁶ Saracen, "Penyebar konten SARA yang dapat memecah belah bangsa", Detiknews. 27 Agustus 2017, dalam

<https://news.detik.com/berita/3616459/saracen-penyebar-konten-sara-yang-dapat-memecah-belah-bangsa>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

kalah hebatnya dengan ancaman militer". Kasad juga menyampaikan juga bahwa Media merupakan senjata dalam perang informasi, maka perlu membentuk opini publik dengan *agenda setting*, *framing* dan *priming*⁷. Disampaikan juga bahwa arus informasi yang sangat deras melalui media teknologi telah terbukti mampu mempengaruhi cara berfikir dan perilaku manusia. Hal ini TNI AD membutuhkan kemampuan untuk membentuk opini dan kontra opini yang tepat dilaksanakan oleh satuan Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad).

Dinas Penerangan Angkatan Darat yang dibentuk pertama kali pada tahun 1953, memiliki peran dan fungsi yang signifikan bagi TNI Angkatan Darat untuk membangun dan mengembangkan komunikasi dengan publik agar setiap tugas yang diemban benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia dan akhirnya mendapatkan dukungan penuh sebagai sebuah legitimasi dalam pelaksanaan tugas. Organisasi Dispenad yang berlaku saat ini, terkesan masih kurang adaptif terhadap tuntutan komunikasi publik yang semakin kompleks medianya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian dan pengkajian

yang komprehensif untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya penataan organisasi Satuan Penerangan TNI Angkatan Darat agar lebih adaptif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan tugas yang semakin berat dimasa yang akan datang.

Penerangan Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD⁸. Di dalam pelaksanaan menjalankan tugasnya, Dispenad sebagai salah satu institusi jajaran TNI AD menyampaikan informasi secara benar dan profesional tentang tugas TNI AD sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat kepada prajurit dan masyarakat, serta memberikan tanggapan yang simpatik manakala ada suatu informasi yang dianggap dapat merugikan citra positif TNI AD melalui media yang ada di Dispenad seperti Media Cetak, Media Elektronik, Media Online dan Penerangan Satuan. Selain itu, Dispenad juga sekaligus sebagai Agen Informasi atau Intelijen Terbuka yang bertugas mengolah, menganalisa, menyampaikan dan mengelola segala informasi baik untuk pihak internal maupun eksternal guna mendukung tugas pokok TNI AD. Selain tugas pokok, Dispenad juga memiliki fungsi utama seperti

⁷ Raychuk, Anna. 2018. Framing, Agenda Setting and Framing Media, dalam https://www.academia.edu/9827598/Framing_Agenda-Setting_and_Priming_in_Media diakses tanggal 22 Mei 2018.

⁸ Keputusan Kasad Nomor Kep-53/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 tentang Organisasi Dinas Penerangan TNI AD.

Penerangan Satuan, Penerangan Media cetak, Penerangan Media Elektronik, Penerangan Media Online dan Penulisan Strategis. Menghadapi opini dan pemberitaan palsu (*hoax*) yang sudah bergulir dengan cepat, tentunya perlu penguatan dari peran dan fungsi Dispenad yang optimal untuk melaksanakan kontra opini pemberitaan palsu dengan memanfaatkan media massa dan teknologi informasi terkini, sehingga diharapkan peran dan fungsi ini dapat menjadi suatu strategi bagi TNI AD dalam mengamankan satuan-satuan jajaran TNI AD beserta prajurit dan keluarganya dari dampak negatif yang cukup besar. Oleh karenanya diperlukan suatu strategi dan upaya yang tepat, agar Dispenad melaksanakan perannya secara optimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam rangka menyikapi dan menghadapi fenomena berita palsu yang terjadi saat ini, sehingga tepatlah kiranya peneliti bila penetapan judul penelitian ini dengan "*Strategi Kontra Opini Pemberitaan Palsu (Hoax) oleh Dispenad*". Penelitian hanya pada rentang waktu tahun 2017 hingga Juli 2018.

Kajian Teoretik

Teori Strategi

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif dan kekurangan-kekurangannya, perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan⁹.

Menurut Bracker yang dikutip oleh Profesor Dr. Aime Heene bahwa secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai "komandan militer" pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan¹⁰.

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani "strategos" diambil dari kata *stratos* yang

⁹ Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT. RajaGrafinfo Persada Jakarta.

¹⁰ Heene, Aime Prof Dr. 2005. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. PT Refika Aditama. Jakarta. hal 53

berarti militer dan Ag berarti memimpin¹¹. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.

Berita

Menurut William S Maulsby mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian para pembaca di surat kabar tersebut¹². Sedangkan Hepwood memberikan pengertian berita sebagai laporan pertama dari kejadian yang penting sehingga dapat menarik perhatian umum. Secara umum berita adalah laporan dari kejadian yang baru saja terjadi dari kejadian yang penting dan disampaikan secara benar dan tidak memihak sehingga dapat menarik perhatian para pembaca berita.

Secara sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Dalam gambaran yang sederhana, seperti dilukiskan dengan baik oleh para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang

disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan.

Berita Palsu

Menurut Marissa Elvia bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial¹³. *Hoax* merupakan eksese negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, kata *hoax* berasal dari Amerika dan awalnya merupakan sebuah judul film yakni “*The Hoax*”. *Hoax* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum. Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras

¹¹ Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal 8

¹² Maulsby, William Shipman. 1925 (2007 digitized). *Getting in News*. Harcourt, Brace.

¹³ Elvia, Marissa. 2018. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*. Jurnal Universitas Lampung.

dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hoax* adalah berita bohong. Dalam *Oxford English Dictionary*, *Hoax* didefinisikan sebagai *malicious deception* atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat¹⁴. Adapun jenis *Hoax* antara lain:

Pertama. *Hoax proper*. *Hoax* dalam definisi termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tahu bahwa berita itu bohong dan bermaksud untuk menipu orang dengan beritanya.

Kedua. Judul heboh tapi berbeda dengan isi berita. Kebiasaan buruk banyak pengguna media internet atau disebut netizen adalah hanya membaca headline berita tanpa membaca isinya. Banyak beredar artikel yang isinya benar tapi diberi judul yang heboh dan provokatif yang sebenarnya tidak sama dengan isi artikelnya.

Ketiga. Berita benar dalam konteks menyesatkan. Kadang-kadang berita benar yang sudah lama diterbitkan bisa beredar lagi di sosial media. Ini membuat kesan bahwa berita itu baru terjadi dan bisa menyesatkan

orang yang tidak mengecek kembali tanggal atau waktunya.

Ancaman

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa¹⁵.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa¹⁶.

Menurut Buku Putih Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan RI 2015 memberikan definisi bahwa ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial¹⁷. Ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun

¹⁴ Oxford English Dictionary, dalam <https://www.rappler.com/indonesia/ayo-indonesia/181912-sketsatorial-apa-itu-hoax>, diakses dari internet tanggal 2 Juni 2018.

¹⁵ UU RI No.3 Tahun 2002, Pasal 4.

¹⁶ UU RI No 34 Tahun 2004

¹⁷ Buku Putih Pertahanan Indonesia Kementerian Pertahanan Tahun 2015

bersenjata, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara bersifat nasional, regional dan internasional, berdampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya maka ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Ancaman Nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, meliputi terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan Ancaman Belum Nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara, saat ini dan ke depan kemungkinannya masih kecil terjadi terhadap Indonesia. Ancaman belum nyata bersifat dinamis dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik.

Menurut Drs. Yehu Wangsajaya, ancaman dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, keduanya memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi sehingga sangat sulit untuk dipisahkan¹⁸. Ancaman dan praktik proxy war telah dapat dilihat di beberapa belahan dunia khususnya di Jazirah Arab yang memiliki potensi kekayaan energi yang melimpah. Demikian juga ancaman ini akan terus merambah ke berbagai negara yang sedang berkembang menuju negara maju dimana negara tersebut memiliki sumber energi dan kekayaan alam. Setiap bangsa di dunia tidak bisa menghindar terhadap praktik proxy war, karena proxy war terjadi sering dengan perkembangan peradaban manusia.

¹⁸ Wangsajaya, Yehu. 2016. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxy War. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Perang Informasi

Definisi perang yang terkenal dan klasik dikemukakan oleh Karl Von Clausewitz yang mendefinisikan perang sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya¹⁹. Menurut Sayidiman Suryohadiprojo dalam buku Pengantar Ilmu perang mengatakan bahwa perang pada zaman Von Clausewitz pemaksaan kehendak masih menggunakan kekerasan sebagai pengganti tindakan diplomasi atau berunding²⁰.

Sebagai gantinya pada zaman sekarang adalah perang informasi yang tidak lagi menggunakan kekerasan. Seorang pakar dari USAF Colonel Alan D. Campen mengatakan bahwa, "*Perang informasi merupakan suatu tindakan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan untuk memanipulasi, meniadakan, mengacaukan atau menghancurkan informasi dan sistem informasi lawan, baik pada masa damai, pada masa krisis atau pada masa perang yang menyentuh pada bidang sosial, ekonomi, industri atau sistem informasi elektronik*

militer". Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bidang informasi atas lawan serta untuk mempengaruhi perilaku, menangkal atau mengakhiri konflik atau jika gagal, untuk memenangkan perang dengan cepat dengan pengeluaran modal, sumber daya dan personel yang minimum serta korban minimum di kedua belah pihak²¹.

Perang Informasi meliputi tindakan yang diambil untuk menjaga integritas sistem informasi sendiri dari segala bentuk eksploitasi, korupsi atau kehancuran pada saat kita memanfaatkan, mengacaukan atau merusak informasi lawan. Manakala kita memperoleh keuntungan informasi dari penggunaan kekuatan [Royal Australian Air Force, *Fundamental of Australian Aerospace Power, August 2002*]. Jadi perang informasi tidak pernah mengenal dimensi waktu baik pada masa damai maupun masa perang, serta informasi dapat mempengaruhi perilaku dalam memenangkan suatu peperangan tanpa pengorbanan biaya dan jiwa yang besar.

¹⁹ Starke, J.G. 2004, Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta, h.699, pada buku *On War* Karl von Clausewitz

²⁰ <http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1326> (diakses 21 Februari 2018)

²¹ Kurnia, Erwin. 2014. Sistem Pertahanan Negara berbasis teknologi informasi dalam mengantisipasi cyberwarfare. Diakses dari internet 28 Juni 2018. https://www.academia.edu/7289508/Sistem_Pertahanan_Negara_Rev

Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau

pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

David F. Smith dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1993:37) menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa : “Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”.

Metode Penelitian

Dispenad berada di jalan Veteran No 5 Jakarta Pusat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Subjek penelitian adalah Kadispnad, Kasubdispensat, Kasubdislisstra, Kasubdis Penmedtak, Penmedlek dan Penmedonline. Objek penelitian adalah strategi kontra opini

dan tugas yang dilaksanakan oleh masing masing fungsi utama Dispenad tersebut.

Untuk sampel penelitian, subjek penelitian dipilih bukan berdasarkan jabatannya, tetapi berdasarkan *expertise* dan tahu secara detail permasalahan penelitian. Teknik *purposive sampling* mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat.

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri atas data primer yaitu wawancara dan penggunaan data sekunder berupa dokumen tentang Dispenad. Wawancara sebagai data primer telah dilakukan terhadap empat subjek penelitian seperti dijelaskan sebelum ini. Manakala dokumentasi sebagai data sekunder telah dilakukan dengan mengambil beberapa informasi terkait pelaksanaan peran tersebut.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan mengadakan *check* antara data pertama dengan data kedua, *recheck* antara data kedua dengan data ketiga, *cross check* antara data ketiga dengan *data* pertama (Moleong, 2017).²²

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan

wawancara lain, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara mendalam dengan informan, membandingkan data hasil observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Terdapat juga tiga teknik analisis data kualitatif (Sugiyono, 2011), yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus mulai dari sebelum, selama dan setelah selesai penelitian dilakukan.²³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dispenad, sesuai Buku Petunjuk Organisasi Dispenad Perkasad Nomor 6 Tahun 2015 Tanggal 4 Februari 2015, memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat. Dispenad memiliki 5 fungsi utama yaitu Penerangan satuan, Penerangan media cetak, penerangan media elektronik, penerangan media online dan penulisan strategis.

²² Idem., hlm. 26.

²³ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: 2011), Alfabeta. hlm. 83.

Perkembangan pemberitaan palsu (hoax) di lingkungan TNI AD saat ini.

Hasil dari data yang diperoleh pada laporan rutin Dispenad tentang monitoring berita palsu yaitu, dalam kurun 2 tahun terakhir ini, 2017 dan 2018, pemberitaan palsu atau hoax sudah tersebar secara luas di lingkungan TNI dan khususnya TNI AD. Berita-berita ini tentunya tidak ada yang bersifat positif, keseluruhan adalah negatif bagi TNI AD serta mayoritas menggunakan media sosial internet seperti *facebook, whatsapp, twitter, youtube, path*, dan lain-lainnya. Bila dikaitkan dengan definisi

Hoax dalam *Oxford English Dictionary*, jenis hoax yang terdiri dari *Hoax Proper*, Judul heboh tapi berbeda isi berita dan berita benar dalam konteks menyesatkan, dengan data postingan diatas, maka sebagian besar berita palsu yang beredar di lingkungan TNI AD adalah jenis **Hoax Proper**, dimana murni berita bohong dibuat dengan sengaja oleh pembuatnya dimaksudkan untuk menipu orang dengan berita. Menurut Kadispenad, Saat ini, Perang informasi telah memasuki seluruh negara-negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Bahkan kondisi di Indonesia saat ini pun telah menghadapi

perang informasi yang begitu dahsyat melebihi perang bersenjata. Serangan-serangan yang nyata dari dunia maya terhadap pertahanan bangsa telah terjadi dalam jumlah yang banyak. Pertahanan ini yang dimaksud adalah kedaulatan bangsa dan negara, bukan dilihat dari fisik geografis bangsa, namun serangan terhadap moral, etika, budaya, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. Jaman sekarang adalah jamannya internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia juga banyak. Sehingga adanya fenomena berita *Hoax* yang menyebar begitu masif baik di masyarakat dan kalangan prajurit TNI AD. Bagaimana bila prajurit sang penjaga NKRI ini diserang moral dan karakternya sehingga jauh dari jiwa Sapta Marga? Tentunya ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan bijak dan *Smart*.²⁴

Fenomena ancaman perang informasi tidak kalah hebatnya dengan ancaman militer, karena sasarannya adalah kehancuran bangsa melalui segala bentuk dan bidang. Apakah kita biarkan sampai hancur negara kita? ataukah kita bisa mampu bersaing secara kompetitif? Potensi ancaman yang ada dalam perang informasi ini antara lain musuh negara dapat membuat

²⁴ Wawancara dengan Kadispenad pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

kerusakan yang dahsyat dari *cyber attack* secara masif, kelumpuhan pemerintahan, infrastruktur industri ekonomi, fasilitas pelayanan umum, transportasi publik, pencurian dan penghancuran data, penyerangan sistem data komputasi awan, serta mengancam ketahanan informasi nasional. Di jajaran TNI AD, peran Dispenad sangat dibutuhkan dalam sistem pertahanan semesta dengan melakukan suatu strategi publikasi melalui media sangat dibutuhkan dalam sistem pertahanan semesta, sehingga dalam menghadapi perang informasi ini adalah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat dari pengaruh negatif teknologi informasi.

Implikasi yang ditimbulkan dari berita palsu (hoax) bagi TNI AD

Dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan palsu atau hoax bagi TNI AD antara lain : **Pertama**, Penurunan Citra TNI AD; **Kedua**, Timbulnya krisis kepemimpinan TNI dengan beredarnya berita palsu tentang pernyataan Panglima TNI dan Kasad di media massa dan sosial yang sebagai wujud pembunuhan karakter; **Ketiga**, Pengikisan terhadap nilai-nilai Pancasila melalui akun-akun palsu dan meng-hack akun milik prajurit TNI sebagai pembela NKRI; **Keempat**, Menurunnya moralitas prajurit Sapta Marga disebabkan

perkembangan teknologi informasi; **Kelima**, Terjadinya kebocoran informasi, dokumentasi, berita rahasia dan kegiatan TNI AD; dan **Keenam**, Adu domba antara TNI-POLRI.

Strategi Kontra opini Dispenad

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi oleh peneliti, ditemukan strategi Dispenad untuk kontra opini berita palsu belum optimal terlihat secara nyata di lapangan. Strategi yang dimiliki belum diurai secara khusus untuk benar-benar serius menghadapi ancaman berita palsu yang beredar secara massif di lingkungan TNI AD, dan bila dibiarkan akan membahayakan integritas institusi. Strategi seharusnya ada **strategi bertahan, menyerang dan membuat jaringan**. Kondisi Dispenad saat ini lebih banyak menggunakan strategi bertahan, seperti melaksanakan Program Kerja dan Anggaran yang telah dibuat rutin setiap tahun yang berdasarkan Buku Petunjuk Organisasi Dispenad dan Program *Road Map* Dispenad yang seakan-akan *given* dari komando atas.

Pembahasan

Hasil pembahasan ini akan dikaitkan dengan teori, konsep dan doktrin yang digunakan untuk memperkuat penelitian ini.

Pembahasan perkembangan pemberitaan palsu (hoax) di lingkungan TNI AD

Pemberitaan palsu secara teori dengan mengacu teori dan definisi berita menurut William S Maulsby, bahwa berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian para pembaca di surat kabar tersebut, maka berita palsu atau *hoax* bukan merupakan kategori definisi berita. Karena berita selalu memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

Demikian pula pendapat dari Sunarjo tentang opini yang merupakan hasil pengalaman apa yang diajarkan kepadanya dengan menitikberatkan pada pendidikan dalam mencari kebenaran, harus dibuktikan sebagian benar pada masa lampau, sekarang dan masa depan. Maka berita palsu atau *hoax* harus lebih dulu dibuktikan kebenarannya, dari mana sumber opini tersebut, dipercaya atau tidak, sehingga akan ditemukan suatu kebenaran didalamnya.

Pada hasil penelitian dapat dipahami bahwa berita palsu atau *hoax* yang ada di lingkungan TNI AD yang diperoleh peneliti di atas menunjukkan bahwa, perkembangan

berita *hoax* saat ini merupakan bagian dari perang opini, perang informasi dan perang modern yang berkembang secara luas di seluruh dunia. Dari semua itu saat ini sudah mengarah ke perang hibrida, yaitu perang menggunakan kombinasi metode militer dan nonmiliter di masa damai untuk mencapai tujuan militer tradisional yaitu memenangkan kampanye militer konklusif melalui penggunaan kekuatan dan beberapa tingkat kekerasan, teknik tidak lazim, kampanye informasi, *proxy*, kegiatan kriminal²⁵. Sejarah tahun 2014 dalam Kampanye Krimea, Pasukan Rusia melaksanakan operasi perang Hibrida klasik dengan perang psikologis, operasi penyesatan, komunikasi internal yang terampil, intimidasi, penyipuan, propaganda internet dan media untuk melemahkan perlawanan. Propaganda dapat bermacam-macam cara yang dilakukan melalui internet atau media, seperti salah satunya adalah penyebaran berita palsu, manipulasi informasi, pembunuhan karakter dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa berita palsu (*hoax*) masuk dalam indikator perang hibrida.

Bahkan di Indonesia sudah meluas sampai ke institusi TNI AD yang notabeneanya

²⁵ Tulak, Arthur Kol (Purn), Angkatan Darat AS. 2016. Perang Hibrida. Agustus 2016 dalam <http://apdf->

magazine.com/id/perang-hibrida/ diakses tanggal 25 September 2018.

sebagai institusi penjaga kedaulatan negara. Ini bisa dibilang Indonesia krisis akan perang informasi melalui penyebaran opini dan berita palsu. Penyebaran tercepat menggunakan media massa seperti media elektronik (televisi, radio), media cetak (surat kabar, majalah, koran, tabloid) dan media online (internet, website), serta media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Path, Tik Tok, dll*). Diantara media tersebut, media sosial lebih cepat menyebarkan berita palsu dan opini yang negatif. Karena masyarakat Indonesia mudah percaya dengan adanya suatu berita tanpa memeriksa akan keabsahan berita tersebut. Selain itu pengguna media sosial masyarakat Indonesia sangat besar dan banyak. Hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah kalangan yang memiliki tujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Saat ini makin meluas dan *familier* dengan istilah *Post Truth* yang ditasbihkan oleh Kamus Oxford tahun 2016. *Post Truth* adalah pernyataan perasaan pribadi mempengaruhi pembentukan opini publik daripada fakta yang obyektif. Di Indonesia, Pejabat publik sering menggunakan *post truth* untuk politik dan kekuasaanya. Sehingga kondisi masyarakat sekarang dapat tergambar melalui media sosial, mudah

meyakini kebenaran tanpa pembuktian data dari literasi dan fakta yang terjadi. Sebuah informasi dengan gampang diyakini tanpa adanya *caption* atau konten. Contoh *Caption #Gantipresiden2019*. Sudah terlanjur viral dan oleh masyarakat sudah masuk dalam benaknya.

Dari analisa di atas yang dikaitkan dengan teori, maka sudah dapat dijelaskan bahwa opini dan pemberitaan palsu (*hoax*) bersifat negatif bagi kedaulatan bangsa dan persatuan kesatuan bangsa. Selalu ada kepentingan dari setiap pemberitaan palsu di belakangnya. Bagi TNI AD ini sangatlah memiliki implikasi dan dampak negatif yang harus dihadapi secara serius, karena sudah menyebar di lingkungan TNI AD, sehingga diperlukan suatu langkah strategis berupa kontra opini terhadap pemberitaan palsu di lingkungannya.

Maka dari itu, guna meminimalisir berita palsu di lingkungan TNI AD agar tidak berkembang secara meluas, diperlukan pendekatan melalui monitoring setiap hari akan adanya penyebaran berita palsu atau *hoax* yang dilakukan berdasarkan kerjasama antara Dinas Penerangan Angkatan Darat dan Staf Pengamanan Angkatan Darat. Fungsinya adalah sebagai kontrol akan adanya pemberitaan palsu yang masuk di

lingkungan TNI AD yang sifatnya merugikan dan menurunkan Citra TNI AD serta memantau penggunaan media sosial yang dilakukan oleh prajurit TNI AD beserta keluarganya.

Pembahasan implikasi yang ditimbulkan dari berita palsu bagi TNI AD.

Pemberitaan palsu secara teori dengan mengacu pada teori ancaman dan menurut TNI AD, berita palsu atau *hoax* adalah ancaman, karena efek dan dampak yang besar akan ditimbulkan hanya dari penyebaran berita tidak benar. Hal ini sejalan dengan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Sedangkan Menurut Buku Putih Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan RI 2015 memberikan definisi bahwa ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial²⁶. Ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis

yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun bersenjata, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara bersifat nasional, regional dan internasional, berdampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya maka ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Pada hasil penelitian dapat dipahami bahwa didapatkan pandangan dari para pimpinan TNI AD tersebut, dapat diambil suatu hal dasar terkait dengan implikasi pemberitaan palsu atau *hoax* bagi TNI AD, diantaranya : **Pertama**, Penurunan nama baik dan Citra TNI AD yang sejak reformasi tahun 1999 hingga sekarang telah menjadi institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat. Tahun 2018 TNI adalah institusi nomor satu dari seluruh Lembaga Negara dinilai oleh kepuasan publik. Hal ini membuktikan bahwa TNI AD harus dapat menjaga citranya dengan baik, serta mencegah adanya berita palsu di

²⁶ Buku Putih Pertahanan Indonesia Kementerian Pertahanan Tahun 2015.

satuan jajarannya; **Kedua**, Timbulnya krisis kepemimpinan TNI dengan beredarnya berita palsu tentang seolah-olah pernyataan Panglima TNI dan Kasad di media massa dan sosial yang sebagai wujud pembunuhan karakter dengan tujuan menimbulkan kebingungan di kalangan prajurit bawahannya, baik bersifat organisasi maupun pribadi; **Ketiga**, Pengikisan terhadap nilai-nilai Pancasila melalui akun-akun palsu dan meng-hack akun milik prajurit TNI sebagai pembela NKRI dengan menyebarkan intoleransi agama tertentu, SARA dan institusi, sehingga menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara; **Keempat**, Menurunnya moralitas prajurit Sapta Marga disebabkan perkembangan teknologi informasi yang menjadi suatu kebutuhan pokok bagi generasi milenial tanpa dapat dikendalikan. Prajurit muda adalah generasi milenial yang melek teknologi, lahir di era digital dan smartpone, serta rentan terhadap budaya asing yang berbau teknologi tanpa disadari bahwa semua berita mengandung suatu kepentingan di belakangnya; **Kelima**, Terjadinya kebocoran informasi, dokumentasi, berita rahasia dan kegiatan TNI AD akibat penggunaan media sosial yang merupakan bentuk penyebaran berita benar dan palsu; dan **Keenam**, Adu

domba antara TNI-POLRI disebabkan ujaran kebencian di media, berita palsu yang menyulut jiwa korsa antar institusi, sehingga ini menjadi suatu kerawanan terhadap sinergitas TNI POLRI dalam mewujudkan keamanan nasional.

Melihat penjelasan teori diatas, Berita palsu atau *hoax* merupakan bagian dari ancaman hibrida, dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk secara masif melumpuhkan dan menghancurkan bangsa Indonesia. Perlu diketahui bahwa perang informasi tidak lagi menggunakan kekuatan militer secara fisik mengadu kekuatan militer yang besar dengan penuh kekerasan untuk mencapai tujuan, melainkan perang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada kaitannya dengan bidang intelijen serta bagian dari *Hybrid Warfare*. Maka dari itu sudah sewajarnya perang informasi ini melibatkan satuan Dinas Penerangan Angkatan Darat selaku penyelenggara bidang Penerangan, komunikasi publik miliknya TNI AD. Selanjutnya dengan berita palsu sebagai ancaman, sudah sepatutnya diperlukan suatu strategi untuk menjawab opini dan berita palsu di lingkungan TNI AD.

Pembahasan strategi kontra opini yang harus dilakukan oleh Dispenad selaku pembina fungsi penerangan TNI AD.

Menurut pendapat Mintzberg dikutip oleh Prof Dr Aime Heene, Etc, bahwa konsep **strategi** mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu : *pertama*, Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya; *kedua*, Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi; *ketiga*, Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya; *keempat*, Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya; dan *kelima*, Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan.

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi

menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif dan kekurangan-kekurangannya, perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan.

Dari teori strategi sebelumnya, telah dijelaskan tentang perkembangan berita palsu atau hoax saat ini dan bagaimana implikasinya bagi TNI AD. Maka dapat diambil simpulan bahwa TNI AD perlu adanya langkah atau strategi kontra opini untuk menghadapi berita palsu, sehingga diharapkan prajurit TNI AD beserta keluarganya tidak tergolong dalam penyebar berita palsu. Strategi yang disampaikan ini, peneliti mencoba untuk membaginya secara internal dan eksternal. Strategi internal tentunya lebih mengutamakan mengoptimalkan organisasi Dispenad dalam menghadapi opini-opini negatif dan berita palsu (hoax) yang sudah beredar di lingkungan TNI AD. Sedangkan Strategi eksternal adalah dengan melakukan kontra opini terhadap berita palsu dengan melaksanakan publikasi secara meluas atau umum agar masyarakat mengetahuinya.

Strategi Bertahan dengan mengoptimalkan strategi yang sudah dimiliki oleh Dispenad dalam menghadapi opini berita negatif atau palsu yang masuk di lingkungan TNI AD. **Pertama**,

Memaksimalkan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Dispenad pada bidang pembentukan opini dan kontra opini dalam rangka peningkatan citra TNI. Selanjutnya strategi kontra opini sebagai bagian dari strategi eksternal di era transparansi dan akuntabilitas yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat, setiap informasi atau berita akan dapat dengan sangat cepat sampai di tangan masyarakat. Dihadapkan pada pelaksanaan tugas TNI AD sebagai tentara rakyat, apapun yang dilakukan oleh TNI AD, baik buruknya akan bisa langsung dinilai oleh masyarakat. Penilaian tersebut tentu saja tidak bisa dijamin obyektifitasnya, karena akan sangat bergantung pada bagaimana media mengelola dan menyajikan informasi atau berita tersebut sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Opini publik akan dengan sangat gampang digiring kepada pemahaman sesuai dengan kepentingan media yang memberitakan.

Kedua, Menjalankan program strategi *Road Map* Dispenad 2016-2019 sebagai peta jalan yang menggambarkan pentahapan strategis dan operasional pembangunan

satuan penerangan TNI AD untuk mencapai sasaran yang dikehendaki yakni terwujudnya Visi dan Misi Dispenad yaitu "*Dispenad yang Menguasai dan Mengendalikan Informasi Bagi Kepentingan Angkatan Darat pada Tahun 2019*".

Ketiga, Menjalankan tugas pokok Dispenad sesuai dengan dasar Buku Petunjuk Organisasi Dispenad (Uji Coba) Tahun 2015 dalam menyelenggarakan fungsi penerangan yang tercantum di dalamnya peningkatan kontra opini yang negatif menyerang institusi TNI AD. Maka bila dihadapkan pada pengertian organisasi menurut J. Winardi dimana organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu²⁷, Dinas Penerangan Angkatan Darat merupakan organisasi dari TNI AD yang memiliki struktur organisasi yang sangat jelas dengan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing yang ingin mencapai tujuan bersama. Setiap Sub Dinas dan Bagian memiliki hubungan satu dengan lainnya. Kadispenad selaku Kepala Pembina Fungsi mengatakan bahwa Dispenad sebagai

²⁷ Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT. RajaGrafinfo Persada Jakarta. hal. 3.

Balakpus selalu siap dan mendukung apa yang diperintah pimpinan TNI AD dalam hal ini Kasad dan Wakasad, khususnya di bidang penerangan kepada prajurit dan satuan jajaran Angkatan Darat dan memberikan informasi tentang TNI AD kepada masyarakat Indonesia secara luas. Dalam menjalankan tugas sebagai Kadispnad dan dibantu oleh para Kasubdis sesuai fungsi masing-masing. Hal ini dikaitkan dengan pada pengertian tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Keempat, Publikasi informasi positif melalui media-media yang ada di Dispenad kepada satuan jajaran TNI AD dan masyarakat secara luas. **Kelima**, Perubahan atau validasi organisasi Dispenad yang ada sekarang ini dihadapkan dengan ancaman berita palsu yang massif di masa akan datang. Perubahan dalam organisasi Dispenad yang disampaikan oleh informan dapat dianggap perlunya validasi organisasi Dispenad untuk mengubah Bujuk Orgas Dispenad 2015. Perubahan pada aspek organisasi atau validasi organisasi Dispenad, seyogyanya

dengan mengacu kepada teori *Public Relation* yang telah dibahas sebelumnya, sebaiknya Dinas Penerangan Angkatan Darat melakukan pembenahan organisasi dan fungsi-fungsi utamanya.

Strategi Menyerang Dispenad terhadap berita palsu yang beredar di lingkungan TNI AD, meliputi : **Pertama**, Meningkatkan publikasi secara rutin dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan media online yang dimiliki Dispenad sebagai bentuk perang opini. **Kedua**, Membuat aturan dan kebijakan yang mengatur tentang penggunaan media sosial, larangan dan keharusan bagi prajurit dalam menggunakan teknologi informasi. Diharapkan seluruh prajurit TNI AD menggunakan media secara bijaksana dan cerdas. Bijak dalam bertukar informasi, lebih dulu menyaring kalimat atau ujaran sebelum *sharing*. Selain itu juga prajurit TNI AD beretika dalam media online demi keamanan pribadi dan keluarga serta satuannya. Pada Surat Telegram Kasad Nomor STR/755/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang penekanan penggunaan media sosial disebutkan agar personel satuan jajaran TNI AD menyikapi secara positif serta hati-hati menggunakan media sosial dengan tidak mengunggah postingan foto dan video pada aplikasi Tik Tok dengan memakai seragam

dinas, serta tidak memanfaatkan lokasi kantor/alutsista saat pembuatan foto dan video di media sosial. **Ketiga**, Memanfaatkan media konvensional sebagai mitra penerangan untuk membantu publikasi kontra opini berita palsu kepada masyarakat. **Keempat**, Pembangunan Crisis Center Dispenad sebagai langkah yang sistematis dalam organ.

Strategi Pembuatan Jaringan adalah strategi antara Dispenad dengan satuan lain dan instansi yang bersifat sinergi untuk menyelesaikan permasalahan beredarnya opini-opini publik yang negatif dan berita palsu atau hoax secara khusus di lingkungan TNI AD dan secara umum di masyarakat Indonesia. **Pertama**, Sinergi Dispenad dengan Intelijen. Satuan Penerangan Angkatan Darat sejatinya adalah insan intelijen yang terbuka, bertugas untuk menyampaikan informasi kedinasan yang sifatnya tidak rahasia. Informasi yang rahasia disampaikan melalui satuan intelijen dengan sandi tertentu. Untuk melaksanakan kontra opini berita palsu di lingkungan TNI AD tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dispenad, dibutuhkan koordinasi yang ketat dalam bentuk sinergitas antara insan penerangan dengan insan intelijen. Sehingga kontra opini diimbangi dengan kontra

intelijen demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sinergi ini juga dapat mencegah adanya kebocoran informasi, dokumentasi, berita dan kegiatan TNI AD ke publik. **Kedua**, Sinergi Dispenad dengan Satuan Teritorial. Satuan kewiyahan atau teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim memiliki tugas pokok menyiapkan wilayahnya menjadi Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh serta dijadikan sebagai wilayah pertahanan negara. Setiap hari aparat teritorial bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah. Pembinaan teritorial sebagai ujung tombak keberhasilan fungsi teritorial dan corong terdepan menyampaikan informasi positif tentang TNI AD kepada masyarakat. Hal ini dapat dijadikan strategi kontra opini terhadap berita palsu oleh aparat penerangan melalui komunikasi sosial yang dilakukan aparat teritorial. Penyampaian informasi, berita dan citra TNI dapat dilakukan secara terbuka oleh aparat teritorial dengan materi dibekali dari satuan penerangan. **Ketiga**, Sinergi Dispenad dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Bekerja sama dan melaksanakan koordinasi secara intens dengan Kemenkoinfo RI terkait dengan berita-berita palsu yang beredar di media massa dan media sosial, karena Kemenkoinfo

RI adalah lembaga negara yang mengatur regulasi tentang komunikasi dan informasi. Strategi dalam menghadapi berita hoax, salah satunya bersama-sama monitoring isu dan data tentang konten-konten negatif di seluruh tanah air. Sehingga mudah untuk mendeteksi dan menutup akun-akun penyebar *hoax*. **Keempat**, Sinergi Dispenad dengan Media Konvensional. Kerjasama dengan berbagai media konvensional yang sudah besar seperti TVRI sebagai stasiun nasional milik pemerintah, Media Group, TV ONE, Trans Media dan media nasional milik swasta lainnya, guna membantu untuk tidak menyebarkan berita negatif atau palsu. Karena TNI AD adalah lembaga negara yang netral, sehingga mudah dalam kerjasama dengan media konvensional. **Kelima**, Sinergi Dispenad dengan POLRI. Kerjasama dilaksanakan ini dalam rangka wewenang POLRI dalam penindakan terhadap penyebar berita palsu sesuai dengan UU ITE No 19 Tahun 2016, dikarenakan Dispenad tidak ada tugas untuk melaksanakan penindakan secara hukum kepada oknum penyebar berita palsu di lingkungan TNI AD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di Bab IV, maka akhir

penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa bermacam-macam berita palsu atau hoax yang telah viral di media massa dan media sosial sejak tahun 2017 di lingkungan TNI AD dan konten-konten negatif menyerang institusi terhormat TNI AD bertujuan untuk provokasi, penurunan Citra TNI, menyudutkan satuan TNI AD, adu domba dan SARA, adalah merupakan bagian dari perang informasi dan modern yang berkembang saat ini secara global. Penyebaran berita hoax ini dilakukan oleh sejumlah kelompok yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi berupa media cetak (televisi, radio), media elektronik (surat kabar, majalah, tabloid), media online (internet, website) serta media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Path*). Pengguna internet di Indonesia sangat besar mengungguli dari Jepang dan masyarakat Indonesia mudah percaya dengan adanya isu atau berita tanpa mengecek lebih dahulu sumber pengirim berita. Hal ini dapat menimbulkan dampak perpecahan persatuan dan kesatuan.

Dispenad selaku satuan dibawah TNI AD yang menyelenggarakan fungsi penerangan dan komunikasi memiliki

tanggung jawab dalam melaksanakan kontra opini terhadap pemberitaan palsu (hoax) di lingkungan TNI AD. Mengenai satuan Dispenad dibahas di penelitian ini dengan pembatasan aspek sumber daya manusia, peralatan dan operasional, serta dihadapkan pada strategi bertahan, menyerang dan pembuatan jaringan. **Pertama**, Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai insan penerangan, personel Dispenad diharapkan memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan publikasi yang baik. Dari jumlah personel dalam organisasi Dispenad saat ini seharusnya dapat mampu menghadapi ancaman perang informasi. Didukung dengan peralatan khusus penerangan yang memadai. Prajurit penerangan harus dapat menjadi komunikator baik, memiliki *relationship* luas, mampu *managemnet back up* dan *good image maker*. **Kedua**, Peralatan/Materiil. Alat Khusus Penerangan yang dimiliki Dispenad saat ini sangat memadai, karena sudah tergolong modern dan dapat mendukung tugas pokok Dispenad dalam menyelenggarakan publikasi pembentukan opini dan kontra opini. Sarana dan prasarana yang ada sekarang juga mampu untuk mengoptimalkan publikasi melalui media cetak dan elektronik. Namun masih ada keterbatasan di media online,

dikarenakan kurang optimalnya website TNI AD yang cenderung kurang aktif mempublikasikan berita informasi tentang kegiatan-kegiatan TNI AD. Sehingga sebagian masyarakat masih awam tentang kegiatan yang dilakukan TNI AD dari latihan, operasi yang dilaksanakan dan kedinasan. **Ketiga**, Operasional. Dispenad memiliki sistem dalam organisasi sesuai Bujuk Orgas Dispenad (Uji Coba) Tahun 2015 yang masih kurang tajam dalam pelaksanaan kontra opini berita palsu. Terbukti masih banyak kebocoran informasi yang bersifat rahasia melalui media sosial. Maka perlu adanya suatu perubahan organisasi dan sistem yang berbau teknologi komunikasi agar dapat mencegah kebocoran tersebut.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan palsu atau hoax bagi TNI AD antara lain : **Pertama**, Penurunan Citra TNI AD; **Kedua**, Timbulnya krisis kepemimpinan TNI dengan beredarnya berita palsu tentang pernyataan Panglima TNI dan Kasad di media massa dan sosial yang sebagai wujud pembunuhan karakter; **Ketiga**, Pengikisan terhadap nilai-nilai Pancasila melalui akun-akun palsu dan meng-hack akun milik prajurit TNI sebagai pembela NKRI; **Keempat**, Menurunnya moralitas prajurit Sapta Marga disebabkan perkembangan teknologi

informasi; **Kelima**, Terjadinya kebocoran informasi, dokumentasi, berita rahasia dan kegiatan TNI AD; dan **Keenam**, Adu domba antara TNI-POLRI.

Oleh karena itu diperlukan strategi kontra opini berita palsu oleh Dispenad sebagai berikut : Pertama, **Strategi Bertahan**. Memaksimalkan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Dispenad pada bidang pembentukan opini dan kontra opini dalam rangka peningkatan citra TNI; Menjalankan program strategi *Road Map* Dispenad 2016-2019; Menjalankan tugas pokok Dispenad sesuai dengan dasar Buku Petunjuk Organisasi Dispenad (Uji Coba) Tahun 2015 dalam menyelenggarakan fungsi penerangan yang tercantum di dalamnya peningkatan kontra opini yang negatif menyerang institusi TNI AD; Publikasi informasi positif melalui media-media yang ada di Dispenad kepada satuan jajaran TNI AD dan masyarakat secara luas; Perubahan atau validasi organisasi Dispenad.

Kedua, **Strategi Menyerang**. Meningkatkan publikasi secara rutin dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan media online yang dimiliki Dispenad sebagai bentuk perang opini; Membuat aturan dan kebijakan yang mengatur tentang penggunaan media sosial, larangan dan

keharusan bagi prajurit dalam menggunakan teknologi informasi; Memanfaatkan media konvensional sebagai mitra penerangan untuk membantu publikasi kontra opini berita palsu kepada masyarakat; Pembangunan Crisis Center Dispenad.

Ketiga, **Strategi Pembuatan Jaringan**. Sinergi Dispenad dengan Intelijen; Sinergi Dispenad dengan Satuan Teritorial; Sinergi Dispenad dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI; Sinergi Dispenad dengan Media Konvensional; Sinergi Dispenad dengan POLRI.

Rekomendasi

Terdapat dua rekomendasi baik yaitu pertama, Validasi organisasi Dinas Penerangan Angkatan Darat, pembuatan aturan atau regulasi yang jelas tentang penggunaan media sosial pribadi prajurit beserta keluarganya dan aturan sanksi yang tegas bila ada yang melanggar, guna menjaga Citra TNI AD.

Kedua, Melaksanakan kerjasama secara sinergi antara TNI AD dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI tentang penghapusan konten atau akun milik prajurit TNI AD yang bersifat pornografi, ujaran kebencian, SARA, dan adu domba TNI-POLRI, sehingga diharapkan dapat tercipta Indonesia yang bersih dan bebas dari ujaran

kebencian, berita palsu (hoax) serta damai sejahtera.

Daftar Pustaka

- Anwar Arifin. 1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung. Armilo.
- Ardianto, Elvinaro Dr, Etc. 2004. *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Baharuddin. 2014. *Strategi Komunikasi Penerangan Kodam VI/Mulawarman Dalam Mendukung Peningkatan Citra TNI AD di Wilayah Kodam VI/Mulawarman* dalam http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/07/02_format_artikel_ejournal
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chotimah, Chusnul Hidayat. 2015. *Membangun Pertahanan dan Keamanan Nasional dari Ancaman Cyber di Indonesia*. *Jurnal Diplomasi*.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*. Third Edition. Los Angeles: Sage Publication, Inc.
- David Hunger dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategi*, Yogyakarta.
- Djoenaesih S. Sunarjo. 1997. *Opini Publik*. Liberty. Yogyakarta.
- Elvia, Marissa. 2018. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*. *Jurnal Universitas Lampung*.
- Hart, Liddel, B.H. 1991. "The Theory of Strategy", dalam *Strategy: The Classic Book on Military Strategy*. London: Meridian Book.
- Heene, Aime Prof Dr. 2005. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. PT Refika Aditama. Jakarta.
- Junaedi, Fajar. 2010. *Relasi Terorisme dan Media*. *Jurnal ASPIKOM*.
- Kurnia, Erwin. 2014. *Sistem Pertahanan Negara berbasis teknologi informasi dalam mengantisipasi cyberwarfare*.
- Maulsby, William Shipman. 1925 (2007 digitized). *Getting in News*. Harcourt, Brace.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Molander, Roger C, Andrew Riddile, Peter A. Wilson, Stephanie Williamson. *Strategic Information Warfare: A New Face of War*. (https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR661/index2.html). Diakses tanggal 15 Februari 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurmantyo, Gatot. 2016. *Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri sebagai Modal Membangun menuju Indoensia Emas*. Jakarta. Puspen TNI.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Praditya, Yosua. 2017. *Penggunaan Strategi Operasi Kontra Intelijen dalam rangka Menghadapi Ancaman Siber Nasional*. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*.
- Raychuk, Anna. 2018. *Framing, Agenda Setting and Framing Media dalam* https://www.academia.edu/9827598/Framing_Agenda-Setting_and_Priming_in_Media (diakses tanggal 22 Mei 2018).
- Romli, Asep Syamsul. 2003. *Jurnalistik Terapan : Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*. Bandung
- Saracen, penyebar konten SARA yang dapat memecah belah bangsa. *Detiknews*. 27 Agustus 2017 dalam <https://news.detik.com/berita/3616459/>

saracen-penyebar-konten-sara-yang-dapat-memecah-belah-bangsa (diakses pada tanggal 22 Mei 2018)

Sastropoetro, Ahmad Santoso. 1986. *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Alumni. Jakarta.

Setiawan Hari Purnomo. 1996. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Starke, J.G. 2004. *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja. Sinar Grafika. Jakarta. h.699, pada buku *On War* Karl von Clausewitz

Tanuwidjaja, William. 2008. Buku "101 Intisari Seni Perang Sun Tzu".

The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal. 2008. *Analisis kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pegawai pada sekretariat Pemerintah Kota Makasar*.

TNI dan Sebaran Hoax di Medsos. Poskotanews. 13 Spetember 2017. dalam <http://poskotanews.com/2017/09/13/tni-dan-sebaran-hoax-di-medsos/> (diakses pada tanggal 22 Mei 2018)

Wahyono, S.K. 2003. *Pengertian dan Lingkup Keamanan Nasional*. KSKN UI.

Wangsajaya, Yehu. 2016. *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxy War*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT. RajaGrafinfo Persada Jakarta.

